

Implementasi Bela Negara Dalam Era Modern: Tantangan dan Strategi Guna Mendukung Keamanan Nasional

Zhafirah Azzahra Juniussyani¹ Moh Ikhwan Syahtaria² Tri Panca Titis Abriansyah³ Pujo Widodo⁴ Achmed Sukendro⁵

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: zhafirahazzahraa@gmail.com¹

Abstrak

Implementasi Bela Negara dalam era modern memiliki tantangan tersendiri guna mendukung keamanan nasional. Dalam era modern yang penuh dengan dinamika dan tantangan keamanan, peran teknologi dan inovasi menjadi krusial dalam mendukung strategi keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teknologi telah mengubah paradigma keamanan, membahas aspek-aspek kunci seperti pemantauan dan deteksi, komunikasi dan informasi, strategi *cyber*, serta pengembangan senjata modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *literature review* jenis *narrative review* dengan teknik pengumpulan data menggunakan *Publish or Perish* dan *Google Scholar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi canggih seperti AI, sensor, dan sistem komunikasi terenkripsi telah memberikan keunggulan yang signifikan dalam menghadapi ancaman kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain tinjauan pustaka. Hasil temuan menunjukkan tantangan dalam mengimplementasikan Bela Negara tidak mudah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Bela Negara serta strategi yang mendukung keamanan nasional. Kesimpulan tulisan ini teknologi dalam era modern memiliki keunggulan dalam mendukung keamanan nasional dan serta menghadapi ancaman nonmiliter.

Kata Kunci: Bela Negara, Inovasi, Keamanan Nasional, Teknologi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keamanan nasional adalah konsep yang mengacu pada upaya menjaga keselamatan dan perlindungan negara dari segala jenis ancaman. Lebih dari sekadar mencakup aspek keamanan, konsep ini juga bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu “*melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Dengan adanya tujuan nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukannya strategi keamanan nasional yang pendekatannya dirancang untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan, kedaulatan, dan integritas suatu negara dan berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal (Smith, 2022). Konsep Bela Negara merujuk pada kesadaran, semangat, dan tindakan warga negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Selaras dengan Umra (2019) yang menyebutkan bahwa bela negara merupakan bentuk tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menunjukkan rasa cinta mereka terhadap negaranya, dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan urgensi sikap “rela berkorban untuk menjamin kelangsungan hidup”. Dalam konteks ini, implementasi Bela Negara di era modern menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan pendekatan tradisional Bela Negara dengan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

Implementasi Bela Negara dalam era modern menjadi semakin penting mengingat dinamika global yang terus berubah, di mana ancaman terhadap keamanan suatu negara tidak hanya bersifat konvensional seperti perang antar-negara, namun juga mencakup ancaman non-konvensional seperti terorisme, *cyber warfare*, dan ancaman global lainnya. Keamanan nasional tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab militer semata, tetapi melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, politik, teknologi, dan juga peran masyarakat sipil (Sidqi & Zubair, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa "*setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam Upaya pembelaan negara*" dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 30 ayat 1 menyebutkan "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*". Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mempertahankan negara Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki, termasuk jiwa dan raga. Hal ini bukan hanya sebagai perintah hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada tanah air dan bangsa, serta sebagai upaya untuk mengukuhkan kedaulatan negara Indonesia (Prasetyo & Berantas, 2014).

Di era modern yang didominasi oleh teknologi canggih, warga negara Indonesia tidak bisa mengabaikan adanya tantangan yang semakin kompleks dan canggih. Meskipun teknologi telah membawa kemajuan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, namun seiring dengan itu juga muncul berbagai masalah baru yang perlu dihadapi. Tantangan tersebut antara lain adalah masalah keamanan *cyber*, penyalahgunaan data pribadi, dan dampak negatif teknologi terhadap lingkungan yang dapat mengancam keamanan nasional (Hutabarat, 2016). Pentingnya pendekatan holistik dalam implementasi Bela Negara juga tercermin dari peran masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, media, dan lembaga swadaya masyarakat dalam membangun kesadaran nasional dan memperkuat solidaritas bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, implementasi Bela Negara dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga keamanan nasional (Subagyo, 2015). Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan beragam potensi dan tantangan, implementasi Bela Negara menjadi sangat penting dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta stabilitas nasional. Dengan memahami kompleksitas dan dinamika dari tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan Bela Negara dalam era modern untuk keamanan nasional yang lebih tangguh dan berkualitas (Azzaria, 2021). Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Ahyati dan Dewi (2021) telah melakukan penelitian berjudul "Implementasi Bela Negara di Era Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bela negara sangat perlu diterapkan di sistem pendidikan, bagi setiap jenjang, yakni SD/SMP/SMA Sederajat.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Widorekno et al. (2021) yang berjudul "Implementasi Nilai-nilai Bela Negara dalam Menghadapi Ancaman Non Militer (Covid-19)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bela negara memiliki urgensi untuk membentuk komponen cadangan sebagai sistem pertahanan negara. Hal ini merupakan salah satu dari faktor utama yang akan membuat sebuah negara terus eksis. Selain itu, Fadil et al. (2023) telah melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Bela Negara (SDGs) Mewujudkan Generasi Islami". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang menjadi subjek analisis memiliki 17 poin pribadi muslim, struktur pribadi muslim, dan

berakhlak mulia. Adapun 17 poin tersebut selaras dengan nilai implementasi bela negara yang dirumuskan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dari tiga penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa implementasi bela negara memiliki banyak urgensi. Namun, dari ketiga penelitian terdahulu di atas belum terdapat penelitian yang membahas korelasi implementasi bela negara dengan keamanan nasional. Layaknya penelitian yang dilakukan oleh Fadil et al. (2023), keamanan juga merupakan salah satu tujuan dari SDGs yang terpatut dalam agenda 2030, yakni “mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan perdamaian dan keamanan” (UN, 2020). Berdasarkan *gap research* tersebut, Peneliti melakukan penelitian yang menghubungkan implementasi bela negara dengan keamanan nasional. Maka dari itu, Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Bela Negara dalam Era Modern: Tantangan dan Strategi Guna Mendukung Keamanan Nasional”. Berdasarkan judul tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “bagaimana peran implementasi bela negara dalam mendukung keamanan nasional?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *literature review* atau tinjauan pustaka yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi berbagai sumber yaitu 1) Jurnal; 2) Buku; dan 3) Internet. *Literature review* merujuk pada sebuah analisis mendalam terhadap teori, temuan, dan materi penelitian lainnya yang diperoleh dari referensi untuk menjadi landasan dalam penulisan. Dalam *literatur review*, data dari sumber-sumber tersebut dievaluasi dengan menggunakan kerangka kerja yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Bela Negara dalam konteks modern. Tulisan ini juga memperhatikan relevansi, reliabilitas, dan validitas informasi yang diperoleh dari tinjauan teori yang bersumber dari jurnal dan buku. Dalam konteks ini, *literature review* digunakan untuk mendapatkan pemaparan yang mendalam terkait tantangan dan strategi dalam implementasi Bela Negara di era modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bela Negara dalam Era Modern

Bela Negara merupakan hak dan kewajiban yang diamanatkan kepada setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 3, yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Di era modern ini, ancaman terhadap keamanan negara menjadi semakin kompleks dan beragam. Konsep Bela Negara juga harus berkembang dan mencakup berbagai aspek yang penting dalam menjaga ketahanan nasional. Beberapa aspek penting tersebut meliputi kesadaran Bela Negara yang didasari oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap kekuatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam konteks modern, ancaman tidak hanya datang dari serangan fisik tetapi juga dari serangan non-fisik seperti penyebaran berita bohong atau hoaks yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, kewajiban Bela Negara tidak hanya dilakukan oleh militer, tetapi juga mencakup peran setiap warga negara dengan segala kemampuannya (Shanovera, 2023). Selaras dengan Taupan (2023) bahwa bela negara tidak serta merta berkaitan dengan militer. Di era modern, sikap bela negara diasosiasikan dengan sikap disiplin, tegas, jujur, melatih jiwa kepemimpinan, dan lainnya. Sikap bela negara dapat dilakukan di mana saja, baik di sekolah, tempat kerja, lingkungan rumah tangga, hingga dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun Nadapdap dkk. (2024) mengemukakan bahwa sebagai suatu konsep, bela negara menekankan peran penting setiap warga negara dalam implementasinya untuk memajukan negara, khususnya di era modern yang mengalami disrupsi digital dewasa ini.

Implementasi Bela Negara

Implementasi Bela Negara dalam konteks keamanan nasional melibatkan sejumlah faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada proses tersebut. Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan pemerintah hingga dinamika sosial-politik yang ada di masyarakat. Dalam konteks internal, pemerintah memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan Bela Negara dan menentukan strategi implementasinya. Hal ini meliputi alokasi sumber daya, pembentukan lembaga-lembaga terkait, serta upaya untuk memperkuat kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat (Putri & Akhirudin, 2024). Salah satu faktor internal yang signifikan adalah ketersediaan sumber daya, anggaran yang dialokasikan untuk keamanan nasional dan Bela Negara dan regulasi serta kebijakan pemerintah dalam program Bela Negara. Pemerintah harus mampu mengalokasikan dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur pertahanan, pelatihan personel militer dan sipil, serta pengembangan teknologi yang mendukung aspek keamanan. Kurangnya anggaran dapat menghambat implementasi efektif dari program Bela Negara, sehingga diperlukan perencanaan keuangan yang cermat dan strategi alokasi yang tepat (Hidayah et al., 2020). Selain itu, keberhasilan implementasi Bela Negara juga tergantung pada struktur dan kapasitas lembaga-lembaga terkait yang ada. Ini termasuk lembaga pertahanan, kepolisian, intelijen, serta organisasi-organisasi sosial yang terlibat dalam kegiatan Bela Negara. Pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keamanan nasional secara komprehensif.

Regulasi dan kebijakan pemerintah dalam program Bela Negara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, semangat, dan tanggung jawab warga negara terhadap pertahanan dan keamanan negara. Program ini mencakup berbagai aktivitas, seperti pelatihan keterampilan pertahanan, pendidikan nasionalisme, partisipasi dalam pertahanan sipil, dan kontribusi dalam situasi darurat nasional. Hal ini terkandung dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 32 Tahun 2016. Salah satu kebijakan pemerintah untuk program bela negara adalah adanya komponen cadangan (Komcad). Komponen Cadangan (Komcad) adalah pelatihan dasar militer bagi warga negara yang terdaftar sebagai anggota Komcad. Program ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan dasar militer yang diperlukan untuk membantu pertahanan negara (Sinaga, 2021). Di sisi lain, faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam implementasi Bela Negara. Kondisi geopolitik regional dan global, termasuk konflik antarnegara, ancaman terorisme, dan perkembangan teknologi militer, dapat mempengaruhi strategi keamanan nasional suatu negara. Pemerintah harus mempertimbangkan dinamika ini dalam merumuskan kebijakan Bela Negara yang responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan keamanan.

Selain itu, kerjasama internasional juga menjadi faktor eksternal yang signifikan. Keterlibatan dalam aliansi pertahanan regional atau global, pertukaran intelijen, dan kerjasama dalam penanggulangan ancaman lintas batas merupakan bagian penting dari strategi keamanan nasional yang efektif. Pemerintah perlu menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Dalam konteks sosial-politik, faktor-faktor seperti identitas nasional, inklusivitas sosial, dan keadilan juga memengaruhi implementasi Bela Negara. Upaya untuk membangun kesadaran nasionalisme dan semangat patriotisme di kalangan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi Bela Negara. Pemerintah juga harus memperhatikan isu-isu sosial yang sensitif seperti ketimpangan ekonomi, konflik etnis, dan radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional (Riptanto & Hasan, 2023). Selaras dengan Widodo dalam Susanti et al. (2021) yang mengemukakan bahwa pembelaan terhadap negara adalah perilaku dan tindakan yang diambil oleh seorang warga negara, berdasarkan rasa cinta pada

tanah air, kesadaran nasional dan kenegaraan, keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta kesiapan untuk berkorban menghadapi ancaman, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun luar negeri.

Tantangan dan Strategi Bela Negara Guna Mendukung Keamanan Nasional

Dalam menghadapi implementasi Bela Negara di era modern, terdapat sejumlah tantangan yang kompleks dan mendalam. Salah satunya adalah pergeseran paradigma dalam ancaman keamanan nasional. Dulu, ancaman tersebut lebih bersifat konvensional seperti invasi militer. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan dinamika geopolitik, ancaman semakin beragam dan tidak selalu terlihat jelas, termasuk ancaman keamanan nasional (Santoso et al., 2023). Keamanan nasional adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan kebijakan publik yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan negara melalui penggunaan kekuatan ekonomi, militer, dan diplomasi, baik dalam situasi damai maupun konflik. Keamanan Nasional merupakan suatu keadaan suatu keadaan yang aman, damai, adanya kenyamanan, keserasian dan keselarasan dalam suatu wilayah (Pedrason, 2021). Keamanan nasional mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam menjaga kondisi aman yang berkelanjutan, serta menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman dan risiko. Ini melibatkan pendekatan yang komprehensif, mencakup pembangunan ekonomi yang stabil, kekuatan militer yang tangguh, dan diplomasi yang efektif untuk mengatasi tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, keamanan nasional juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan kerjasama dengan negara lain untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas (Pedrason, 2021). Ancaman keamanan saat ini tidak hanya berasal dari negara-negara lain, tetapi juga dari aktor non-negara seperti kelompok teroris, organisasi kriminal lintas negara, dan bahkan serangan siber yang dapat dilakukan secara anonim dari mana saja di dunia. Hal ini menimbulkan tantangan dalam merumuskan strategi Bela Negara yang komprehensif dan adaptif terhadap berbagai bentuk ancaman (Soepandji & Farid, 2018).

Selain itu, tantangan lainnya adalah pemahaman yang beragam mengenai konsep Bela Negara di kalangan masyarakat. Meskipun secara formal konsep ini mungkin telah diatur dalam dokumen-dokumen kebijakan, namun pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran individu dalam mempertahankan keamanan nasional masih belum merata. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi yang memadai mengenai konsep Bela Negara, serta kurangnya kesadaran akan ancaman nyata yang dihadapi. Implementasi Bela Negara juga dihadapkan pada tantangan internal dalam hal koordinasi antarlembaga dan peran yang jelas dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan. Keterlibatan berbagai sektor seperti militer, kepolisian, intelijen, dan lembaga pemerintah lainnya memerlukan koordinasi yang baik agar strategi Bela Negara dapat berjalan efektif. Namun, seringkali terdapat kendala dalam hal komunikasi, pembagian tugas, dan sinergi antarlembaga (Manurung dkk., 2022). Di samping itu, adanya perubahan dinamika politik dan sosial di tingkat nasional maupun internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, pergeseran kekuatan geopolitik, konflik internal di beberapa negara, dan perubahan paradigma dalam diplomasi internasional dapat mempengaruhi strategi Bela Negara suatu negara. Fleksibilitas dan adaptabilitas dalam merespons perubahan-perubahan ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Lebih lanjut, aspek ekonomi juga memainkan peran penting dalam implementasi Bela Negara. Kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya juga bergantung pada kekuatan ekonominya. Tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kerentanan terhadap tekanan ekonomi dari luar, serta isu-isu terkait dengan sumber

daya energi dan pangan dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Bela Negara suatu negara. Selain tantangan-tantangan yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi implementasi Bela Negara dalam era modern. Misalnya, peran media massa dan teknologi informasi dalam membentuk opini publik dan persepsi mengenai keamanan nasional, peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung upaya Bela Negara, serta dinamika hubungan antarbangsa yang dapat memperkuat atau mengancam stabilitas keamanan suatu negara. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam merumuskan strategi Bela Negara yang efektif dan adaptif terhadap dinamika keamanan nasional yang terus berkembang. Kesadaran akan pentingnya peran individu dalam menjaga keamanan nasional juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih luas dan mendalam (Anakotta & Disemadi, 2020).

Teknologi dan inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung strategi keamanan nasional di era modern. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan militer telah mengubah lanskap keamanan secara signifikan, memungkinkan negara-negara untuk menghadapi tantangan baru dan mengoptimalkan strategi pertahanan mereka. Dalam konteks ini, peran teknologi dan inovasi dapat dibagi menjadi beberapa aspek kunci yang mencakup pemantauan dan deteksi, komunikasi dan informasi, strategi cyber, serta pengembangan dan penerapan senjata modern (Gredinand, 2017). Teknologi memainkan peran vital dalam pemantauan dan deteksi ancaman terhadap keamanan nasional. Sistem pemantauan seperti sensor, satelit, dan jaringan pengawasan memungkinkan pemerintah untuk mengawasi pergerakan musuh potensial, aktivitas militer, dan ancaman lainnya secara real-time. Pemanfaatan teknologi canggih seperti analisis data berbasis kecerdasan buatan (AI) juga memungkinkan untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau mengidentifikasi ancaman potensial dengan lebih cepat dan akurat (Hayati, Tranggono, Arier, et al., 2024). Selain itu, kemajuan dalam bidang komunikasi dan informasi menjadi kunci dalam meningkatkan koordinasi dan respons terhadap situasi keamanan. Sistem komunikasi yang andal dan aman, termasuk jaringan komputer terenkripsi dan sistem komunikasi militer, memungkinkan pemerintah dan pasukan keamanan untuk berkomunikasi secara efektif dan mengkoordinasikan tindakan dalam situasi darurat atau konflik. Penggunaan teknologi seperti telekonferensi dan sistem komando dan kendali juga memfasilitasi koordinasi antara unit-unit militer yang tersebar di berbagai lokasi.

Selanjutnya, strategi keamanan nasional juga semakin terfokus pada dimensi cyber sebagai bagian integral dari pertahanan suatu negara. Ancaman cyber seperti serangan peretasan, pencurian data, dan sabotase infrastruktur kritis menjadi semakin kompleks dan serius. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keamanan nasional harus memprioritaskan pengembangan strategi cyber yang efektif, termasuk penguatan sistem keamanan informasi, deteksi dini serangan cyber, dan respons cepat terhadap ancaman yang muncul. Tidak hanya itu, teknologi dan inovasi juga memengaruhi pengembangan dan penerapan senjata modern dalam konteks keamanan nasional. Misalnya, pengembangan drone dan teknologi drone militer telah mengubah cara operasi militer dilakukan, memberikan keuntungan dalam pemantauan udara, pemetaan wilayah musuh, dan bahkan serangan udara yang presisi. Di sisi lain, pengembangan senjata non-kinetik seperti sistem pertahanan rudal anti-ballistik dan sistem pertahanan udara juga menjadi fokus penting dalam menghadapi ancaman dari luar negeri (Sebastian, 2015). Selain aspek teknologi yang langsung terkait dengan keamanan militer, peran teknologi dan inovasi juga dapat dilihat dalam upaya membangun ketahanan nasional secara lebih luas. Misalnya, pengembangan teknologi energi terbarukan dan infrastruktur yang

tangguh dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar negeri dan meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara. Begitu juga dengan penggunaan teknologi dalam sektor kesehatan dan kebencanaan, yang dapat mempercepat respons dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat atau bencana alam (Fatimah, Rahakbauw, & Eriyono, 2023).

Strategi Guna Keamanan Nasional adalah kumpulan rencana dan tindakan yang dirancang untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan integritas suatu negara. Strategi ini mencakup berbagai aspek yang meliputi pertahanan militer, diplomasi, keamanan dalam negeri, keamanan siber, intelijen, dan kerja sama internasional. Dalam konteks implementasi Bela Negara dalam era modern, strategi keamanan nasional menjadi sangat penting karena menghadapi berbagai tantangan baru yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dinamika geopolitik global, dan ancaman nontradisional yang kompleks (Krisnanik et al., 2023). Salah satu aspek penting dari strategi keamanan negara adalah pertahanan militer. Dalam era modern, pertahanan militer tidak hanya berkaitan dengan kekuatan senjata dan personel, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi canggih seperti drone, kecerdasan buatan, dan kekuatan siber. Negara-negara modern harus terus mengembangkan dan memperkuat kemampuan militer mereka untuk menghadapi ancaman dari berbagai arah, baik itu dari negara-negara lain maupun kelompok ekstremis (Pramitasari, 2021). Selain itu, strategi keamanan negara juga mencakup aspek diplomasi yang kuat. Diplomasi menjadi alat penting dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, memperkuat aliansi strategis, dan mengatasi konflik secara damai. Dalam konteks Bela Negara, diplomasi menjadi sarana untuk mempromosikan nilai-nilai dan kepentingan nasional, serta memperjuangkan posisi negara dalam forum internasional.

Keamanan dalam negeri juga menjadi fokus utama dalam strategi keamanan nasional. Negara harus mampu menjaga ketertiban dalam negeri, melindungi warganya dari ancaman terorisme, kejahatan transnasional, dan konflik internal. Ini melibatkan kerja sama antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan keamanan dan stabilitas di tingkat lokal maupun nasional (Indrawan & Aji, 2018). Selanjutnya, keamanan siber menjadi aspek yang semakin penting dalam strategi keamanan negara. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi, negara harus mampu melindungi infrastruktur vital seperti jaringan komputer pemerintah, sistem keuangan, dan industri strategis dari serangan cyber yang dapat mengancam keamanan nasional. Intelijen atau informasi intelijen juga merupakan bagian integral dari strategi keamanan negara. Intelijen menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman potensial, baik dari dalam maupun luar negeri. Keberhasilan strategi keamanan nasional sering kali bergantung pada kemampuan intelijen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan terkait (Umra, 2019). Bahaya mengenai teknologi ini disampaikan oleh Putri dalam Salsabila et al. (2023) yang mengemukakan bahwa penyalahgunaan teknologi menyebabkan kemerosotan moral dan karakter masyarakat karena menerima informasi yang tidak benar. Istilah “karakter” dalam bahasa mencerminkan sifat yang konstan, sehingga menjadi ciri khas yang membedakan satu individu dari yang lain. Terakhir, kerja sama internasional menjadi faktor kunci dalam strategi keamanan negara. Negara tidak dapat mengatasi tantangan keamanan modern secara mandiri, sehingga kerja sama dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga internasional menjadi sangat penting. Melalui kerja sama ini, negara dapat bertukar informasi, berbagi sumber daya, dan mengkoordinasikan upaya untuk menghadapi ancaman bersama-sama. Secara keseluruhan, strategi keamanan negara dalam konteks implementasi Bela Negara dalam era modern haruslah komprehensif, adaptif, dan proaktif. Negara harus terus

mengembangkan dan memperkuat strategi keamanannya sesuai dengan dinamika yang ada, serta memanfaatkan berbagai sumber daya dan teknologi yang tersedia untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan bangsa (Yunita et al., 2023).

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dalam implementasi Bela Negara. Ini mencakup penguatan kapasitas lembaga-lembaga terkait, peningkatan kerjasama internasional, pembangunan kesadaran nasional, serta penanganan isu-isu sosial yang mendasar. Dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi Bela Negara, suatu negara dapat memperkuat keamanan nasionalnya secara efektif di era modern yang kompleks ini. Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi yang semakin kuat, kolaborasi internasional dalam bidang teknologi dan inovasi juga menjadi penting untuk meningkatkan keamanan nasional. Pertukaran informasi, kerja sama dalam pengembangan teknologi militer, dan forum internasional untuk diskusi strategis dapat membantu negara-negara untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks dan lintas batas (Hayati dkk., 2024). Maka dari itu, peran pemerintah tidak boleh lepas dalam meningkatkan implementasi bela negara. Nurgiansah dan Rachman (2022) menyebutkan bahwa pemerintah juga harus membuat kebijakan yang mendukung usaha-usaha pembentukan sikap nasionalisme di masyarakat wilayah perbatasan. Misalnya, dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas fasilitas umum dan infrastruktur di daerah tersebut, serta mengadakan kegiatan yang mempromosikan bela negara. Secara keseluruhan, peran teknologi dan inovasi dalam mendukung strategi keamanan nasional sangatlah vital di era modern ini. Dengan memanfaatkan teknologi secara cerdas dan inovatif, negara-negara dapat memperkuat pertahanan mereka, meningkatkan respons terhadap ancaman, dan membangun ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang (Murfi & Suharyo, 2024).

KESIMPULAN

Peran teknologi dan inovasi dalam mendukung strategi keamanan nasional tidak dapat diabaikan. Teknologi memberikan keunggulan dalam pemantauan, komunikasi, dan pertahanan *cyber*, yang semuanya penting dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Pengembangan senjata modern juga merupakan aspek penting dalam memperkuat pertahanan negara. Namun, perlu diingat bahwa teknologi hanya merupakan alat, dan keberhasilannya tergantung pada penggunaannya yang bijak dan terpadu dengan strategi keamanan nasional yang komprehensif. Penting untuk menyadari bahwa sementara teknologi dan inovasi memberikan keunggulan dalam keamanan nasional, ada sejumlah pertanyaan dan tantangan yang perlu diatasi secara bijaksana. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan proaktif, negara-negara dapat memaksimalkan manfaat teknologi dalam mendukung strategi keamanan nasional sambil meminimalkan risiko yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyati, A. I., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Bela Negara di Era Teknologi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal on Education*, 3(3), 236–247.
- Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan pembangunan sistem keamanan nasional Indonesia dalam kerangka legal system sebagai upaya menanggulangi kejahatan terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 41–71.
- Azzaria, S. (2021). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan kesadaran bela negara pada generasi milenial. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(1), 57–74. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1925>

- Deswanti, A. I., Novitasari, D., Asbari, M., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan: Narrative Literature Review. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(3), 34–40.
- Fadil, C., Zawawi, Z., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi Bela Negara (SDGs) Mewujudkan Generasi Islami. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7268–7276. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2949>
- Fatimah, F., Rahakbauw, I. K., & Eriyono, R. H. (2023). Operasi Militer Selain Perang dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia : Peluang , Tantangan, dan Studi Komparasi Operasi Militer Selain Perang Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10083>
- Gredinand, D. (2017). Penerapan pendidikan bela negara di perguruan tinggi. *Strategi Pertahanan Darat*, 3(2).
- Hayati, K. R., Tranggono, Rahmalia, I., Malih, A. R., Lesmana, M. Y. C., & Sihombing, D. S. (2024). Peran penting mahasiswa ekonomi pembangunan UPN "Veteran" Jawa Timur dalam menghadapi ancaman negara non-militer melalui mata kuliah bela negara. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social and Humanities*, 2(1), 1–7.
- Hayati, K. R., Tranggono, T., Arier, T. N., Putri, P. A., & Wicaksono, B. (2024). Pengembangan pola berpikir kualitas SDM dan SDA pada bidang industri makanan dalam wawasan bela negara. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(2), 455–463. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i02.580>
- Hidayahl, Y., Retnasari, L., & Ulfah, R. A. (2020). Membangun sikap bela negara mahasiswa melalui pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v3i1.424>
- Hutabarat, L. F. (2016). Diplomasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i2.308>
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2018). Pendidikan bela negara sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.437>
- Krisnanik, E., Yulistiawan, B. S., Indriana, I. H., & Yuwono, B. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelestarian budaya dan wujud bela negara. *Jurnal Bela Negara*, 1(2).
- Manurung, Y. S., Saragih, H., & Sarjito, A. (2022). Martabat bangsa dan negara di atas segala-galanya: Tinjauan aksiologis filsafat ilmu pertahanan dalam upaya meningkatkan kemampuan bela negara. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1): Mei 2022).
- Marsetio, M. (2013). Perairan bermasalah: Tantangan maritim di Asia Pasifik. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i2.382>
- Murfi, Y., & Suharyo, B. (2024). Sishankamrata: Analisis komprehensif sistem pertahanan dan keamanan Indonesia terpadu dalam perspektif sejarah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1) (2024).
- Nadapdap, K. T. K., Nahriva, A. Z., Zaki, A., Rasya, H. S., Nabillah, F., & Rahmania, A. (2024). Bela Negara Dalam Pertahanan Dan Keamanan: Peran Strategis Warga Negara Menurut Markas Besar Tni Cilangkap. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 19–26.
- Pramitasari, A. W. (2021). Penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui pertunjukan seni dan budaya. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 23–27.
- Prasetyo, T. B., & Berantas, S. (2014). Ancaman aktual penyelundupan imigran Indonesia - Australia dalam perspektif keamanan nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(1).
- Putri, M., & Akhirudin. (2024). Membangun kesadaran bela negara bagi generasi milenial. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 6(2).

- Riptanto, S. H., & Hasan, S. (2023). Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber daya nasional di Kalimantan Timur guna menghadapi ancaman militer di Alki II. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(4), 965–974.
- Rodon Pedrason. (2021). Buku ajar keamanan nasional (T. Lestari, Ed.). CV. Jakad Media Publishing.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian integrasi nasional dalam NKRI tidak dapat diubah dan sumpah pemuda Indonesia abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1).
- Sebastian, E. (2015). Peningkatan peranan SDM pertahanan nasional guna menghadapi perang generasi keempat. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1).
- Shanovera, D. A. (2023, Februari 24). Konsep bela negara di era digital dalam perspektif ketahanan nasional. Binus University.
- Sidqi, T., & Zubair, K. (2018). Aktualisasi kegiatan bela negara di sekolah. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelktualitas*, 6(1). <https://doi.org/10.31942/pgrs.v6i1.2209>
- Sinaga, Y. T. (2021). Komponen cadangan sebagai wujud bela negara dan strategi dalam menangkal ancaman radikalisme-terorisme di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 1(2), 49–58.
- Smith, J. (2022). *National security strategies in the modern world*. Oxford University Press.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436.
- Subagyo, A. (2015). Syarat-syarat kesiapan penyelenggaraan program bela negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(3). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i3.367>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Taupan, A. (2023). Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.7>
- Umra, S. I. (2019). Penerapan konsep bela negara, nasionalisme atau militerisasi warga negara. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art9>
- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 164–178.
- Widorekno, R. A., Apriliana, W. R., & Supriyadi. (2021). Implementasi Nilai-nilai Bela Negara dalam Menghadapi Ancaman Non Militer (Covid-19). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(4), 786–792.
- Yunita, E., Margiyanti, I. Y., Alawiyah, S., & Triadi, I. (2023). Penerapan nilai-nilai bela negara dalam menghadapi tantangan era digital. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4): Desember: *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*).